



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 31
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Komisi Daerah Lanjut Usia Jawa Barat, Panti Pelayanan Sosial DKI Jakarta, Komisi Nasional HAM Indonesia (Komnas HAM), dan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLUI), Pakar Lanjut Usia Universitas Indonesia Dr. Ir. Lilis Heri Mis Cich, M.Si
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 29 September 2020.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Peran Panti, Komda, Komnas HAM dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia dari Aspek Pelayanan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya.
Ketua Rapat	: Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA..
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 21 dari 28 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI. 2. 3 Orang Anggota Panja Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Komisi Daerah Lanjut Usia Jawa Barat, Panti Pelayanan Sosial DKI Jakarta, Komisi Nasional HAM Indonesia (Komnas HAM), dan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLUI), Pakar Lanjut Usia Universitas Indonesia Dr. Ir. Lilis Heri Mis Cich, M.Si

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.16 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja RUU Kesejahteraan Lanjut Usia DPR RI, Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, dan Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyampaikan beberapa materi yang dimasukkan dalam perubahan undang-undang, antara lain: Memuat prinsip Non Diskriminasi, pemenuhan rasa aman; adanya lembaga independen (Komisi) seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dan RUU memuat hak-hak pelayanan dasar bagi lanjut usia.
2. Komisi Daerah Lanjut Usia Jawa Barat, menyampaikan beberapa hal pokok: penguatan kelembagaan Komda di daerah dan Komnas Lanjut Usia di pusat dan Memandang bahwa Lanjut Usia bukan sebagai beban.
3. Lembaga Lanjut Usia Indonesia menyampaikan beberapa materi pokok antara lain pengaturan penguatan program kesejahteraan lanjut usia, dan peran serta lembaga dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia
4. Kepala Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) Bambu Apus Menyampaikan beberapa hal pokok, antara lain: Penguatan sumber daya manusia. Pemenuhan kebutuhan pokok lanjut usia, dan penguatan program pelayanan lanjut usia yang dilakukan di Panti.
5. Dr. Ir. Lilis Heri Mis Cich, M.Si, dari Lembaga Demografi UI, menyampaikan beberapa hal pokok dalam RUU antara lain: Paradigma RUU berisikan kebijakan program kelanjutusiaan, penguatan peran keluarga dan sinergi pemerintah pusat, antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, program pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, dan psikologis.

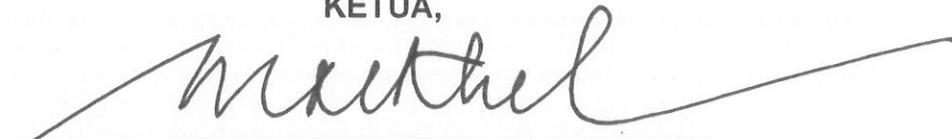
Selanjutnya berbagai masukan dan pendapat dalam RDPU ini sudah dicatat untuk menjadi bahan penyusunan RUU.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.54 WIB.

PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI

KETUA,



Laksdya TNI (PURN) MOEKHLAS SIDIK, MPA.